

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, ed. 1, cet. 3, Kencana, Jakarta.
- Achmad Ihsan, 1969, *Hukum Perdata IA*, cet. I, Pembimbing Masa, Jakarta .
- Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur: Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 7, Rajawali Pres, Jakarta.
- Amrullah (et. Al.), 1996, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta.
- B.N. Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 1985, *Sistem Hukum Indonesia*, cetakan kedua, CV Remadja Karya, Bandung .
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, ed. 1, cet. 1, Rajawali, Jakarta .
- _____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. 3, Citra Adiya Bakti, Bandung .
- Boedi Harsono, *Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan*, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Diselenggarakan Dalam Rangka Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pada tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 1975 di Yogyakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta.
- Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, cet. ke-1, PT Alumni, Jakarta .

- Chairul Huda, 2006, ***“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘Menuju Kepada’ Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”***, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 1983, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan pertama, PT Bina Aksara, Jakarta .
- Fachri Bey, 2009, ***Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak***, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Fred Dallmayr, 2008, “Hermeneutika dan Rule of Law”, dalam Gregory Leyh (ed.), ***Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik***, cet. 1, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
- H.m. Rasjidi, 1980, ***Keutamaan Hukum Islam***, Bulan Bintang, Jakarta .
- J.E. Sahetapy, 1982, ***Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana***, ed. 2, CV Rajawali, Jakarta .
- Mahmu Tarom, 2009, ***Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dalam Hukum Positif, Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)***, cet. ke-1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- MM. Djojodiguno, ***Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional***, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Diselenggarakan Dalam Rangka Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 1975 di Yogyakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983, ***Asas-asas Hukum Pidana***, cet. ke-1, PT Bina Aksara, Jakarta .
- Muhammad Tahir Azhari, 2007, ***Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini***, ed. 2, cet. 3, Kencana, Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosedibio, 1996, ***Kamus Hukum***, cet. 12, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Radisman F.S. Sumbayak, 1985, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pematapan Penegakan Hukum*, cet. 1, Ind-Hill, Co'85, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1991, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta .

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1976, *Pengertian Hukum Adat, Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat (living law) dan Hukum Nasional*, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Diselenggarakan Dalam Rangka Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pada tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 1975 di Yogyakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta.

_____, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung .

_____, 1978, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

_____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

_____, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta .

_____, 1985, *Teori yang Murni tentang Hukum*, Alumni, Bandung.

Suwoto, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Burgelijk Wetboek voor Indonesia (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (terjemahan R. Soesilo, 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetak ulang, Politeia, Bogor).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2015, dengan diundangkan

di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011, acarapidana.bphn.go.id, akses tanggal 17 Agustus 2016.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah:

“*Tingginya Kematian Ibu Terkait Nikah Usia Dini*”, Kompas, 6 Oktober 2015.

“*Teliti Asas Legalitas, Yahya Raih Doktor*”, Suara Merdeka, Senin, 22 Juli 2016.

“*Kembali ke Politik Pembangunan Hukum Nasional*”, Varia Peradilan Nomor 326 Januari 2013.

“*Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan*”, www.hukumonline.com, akses tanggal 11 Nopember 2015..

Asep Nursobah, diterbitkan pada 9 Oktober 2015, “*Ketua MA: Pemisahan Panitera dan Sekretaris Untungkan Lembaga Peradilan*”, <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>, akses tanggal 10 Pebruari 2016..

Asrofi, “*Batas Usia Dewasa Dalam Perspektif Hukum dan Penerapannya Pada Pengadilan Agama*”, Varia Peradilan Nomor 354 Mei 2015.

Bachtiar Abna, 2009, “*Filsafat Hukum Adat dan Hukum Negara*”, makalah disampaikan dalam Musyawarah Kerja LKAAM Suamera Barat pada acara Bimbingan Teknis Beracara Hukum Adat, Padang, 16-17 Februari 2009.

Bagir manan, “*Hakim dan Prospek Hukum*”, Varia Peradilan Nomor 343 Juni 2014.

_____, “*Hakim dan UUD (Konstitusi)*”, Varia Peradilan Nomor 276 November 2008.

_____, “*Konsistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum*”, Varia Peradilan Nomor 275 Oktober 2008.

_____, “*Perjalanan Pelaksanaan Syariaat Islam di Aceh*”, Varia Peradilan no/ 363 Februari 2016.

Bambang Sadono, “*Politik Hukum UU 23/2014-2/2015-9/2019tentang*

Pemerintahan Daerah, Implikasinya pada Kewenangan Pusat-Daerah, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional: Politik Hukum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Implikasinya Dalam Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, diselenggarakan oleh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, tanggal 27 Agustus 2016.

Data Jumlah Perkara dalam Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 31 Desember 2015.

Guse Prayudi, "***Pendampingan Penasihat Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum***", *Varia Peradilan* No. 348 November 2014.

H.M. Arsyad Sanusi, "Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya", ***Varia Peradilan Nomor 288 November 2009***.

Harifin A. Tumpa, "Apa yang Diharapkan Masyarakat Dari Seorang Hakim", ***Varia Peradilan Nomor 298 September 2010***.

Saratri Wilonoyudho, "*Investasi untuk Remaja Perempuan*", *Suara Merdeka*, Jumat, 15 Juli 2016.

Maryanto, ***Perbandingan Sistem Hukum***, Bahan Ajar Mata Kuliah Perbandingan Sistem Hukum, pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Kuliah Semester II Tahun Akademik 2014-2015..

_____, ***Politik Hukum***, bahan ajar Mata Kuliah Politik Hukum pada Program Pascasarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semester I, 2015.

Masrum, "***Umur Dewasa Bukan 21 Tahun***", www.badilag.net, akses tanggal 12 November 2015.

Mustaghfirin, ***Kembali ke Khitah Sistem Hukum Nasional***, unissula.ac.id, tanggal 24 September 2015.

Muhammad Thohir, 1993, ***Seminar Kesehatan Anak***, Rumah Sakit Islam Surabaya .

Rehngena Purba, "Hukum Adat Dalam Yurisprudensi", ***Varia Peradilan Nomor 260 Juli 2007***.

Rustam, ***Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak***, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum,

Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2013.

Rohimi Shapiee, *“Islamic International and Comparative Law: UNISSULA Seminar on Comparative Law of Various Law Systems in the World”*, Narasumber dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Semiloka Kurikulum “Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Mengacu pada KKNi dalam Menghadapi Berlakunya MEA” dan Seminar Internasional dengan tema: *“Comparative Law of Various Law Systems in the World”*, Semarang, tanggal 22-23 Desember 2015.

Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang Kelas II: Di Bawah Pengadilan Tinggi Semarang, Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Jakarta .

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 02 Nomor 2 Juli 2013.

D. Internet:

Masrum, *“Umur Dewasa Bukan 21 Tahun”*, www.badilag.net, akses tanggal 12 November 2015.

Naffi, *“Analisis Terhadap Pasal 6 ayat 2 KHI: tentang Kekuatan Hukum Pencatatan Perkawinan”*, www.badilag.net akses tanggal 10 September 2015.

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, akses tanggal 18 Februari 2016, untuk kata “rekonstruksi”.

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, akses tanggal 8 Februari 2016, untuk kata “kaidah”.

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>, akses tanggal 2 Februari 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, akses tanggal 31 Januari 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa>, akses tanggal 31 Januari 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pujiono_Cahyo_Widianto, akses tanggal 26 Agustus 2016.